

**KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP PULAU-PULAU
KECIL TERLUAR SEBAGAI BERANDA DEPAN KEDAULATAN
NEGARA (PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO)**

Oleh :

RAMBU ASANA

372013603

SKRIPSI

Diajukan Kepada

**Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Komunikasi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

Salatiga

2016



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rambu Asana
NIM : 372013603 Email : rambu.asana@yahoo.com
Fakultas : FISKOM Program Studi : Hubungan Internasional
Judul tugas akhir : Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan Kedaulatan Negara (Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo)
Pembimbing : 1. Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M.Si
2. Adrianus Bintang H.N., SE., M.A

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

1956

Salatiga, 10 Februari 2017



Rambu Asana



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rambu Asana
NIM : 372013603 Email : rambu.asana@yahoo.com
Fakultas : FISKOM Program Studi : Hubungan Internasional
Judul tugas akhir : Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau
Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan Kedaulatan
Negara (Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo)

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

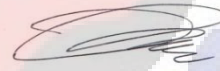
- a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.


** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

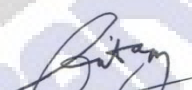
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 10 Februari 2017


Rambu Asana
Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,


Dr. Ir. Sri Suwarningsih, M.Si
Tanda tangan & nama terang pembimbing I


Adrianus Biantoro H.M. SE., M.A
Tanda tangan & nama terang pembimbing II

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA
TERHADAP PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
SEBAGAI BERANDA DEPAN KEDAULATAN
NEGARA (PADA MASA PEMERINTAHAN
JOKO WIDODO)**


Nama Mahasiswa : **RAMBU ASANA**

NIM : **372013603**

Program Studi : **HUBUNGAN INTERNASIONAL**

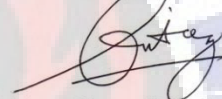
Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M. Si

Pembimbing Pendamping,



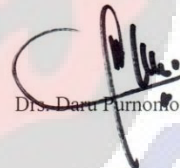
Adrianus Bintang H.N., SE., M.A

**Diketahui Oleh,
Kaprodi,**



Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M. Si

**Disahkan Oleh,
Dekan,**



Dis. Daru Purnomo, M.Si

Disetujui tanggal : 30 Januari 2017

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi
Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga
2017**

KATA PENGANTAR

Suatu hadiah bagi Indonesia dengan kehadiran Doktrin Poros Maritim yang dibawa Joko Widodo dalam masa pemerintahannya. Sektor kemaritiman merupakan identitas bangsa yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya di tengah-tengah kepentingan nasional, regional bahkan global. Indonesia, untuk menjadi bangsa yang besar sangat perlu memperhatikan identitas yang dimilikinya. Dengan keadaan geografis di mana 2/3 adalah air, dan predikat sebagai negara kepulauan terbesar, Joko Widodo pantas mengumandangkan Doktrin Poros Maritim tersebut. Dalam Doktrin tersebut, Joko Widodo pulau-pulau kecil terluar sebagai salah satu komponen pencapaian Doktrin. Pada masa pemerintahannya, pulau-pulau kecil terluar mengambil tempat yang strategis yakni sebagai beranda depan kedaulatan negara. Hal inilah yang menarik bagi penulis, karena pulau-pulau kecil terluar merupakan mata dan telinga dari setiap aktifitas yang terjadi di perbatasan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan satu teori besar yakni Konstruktivisme. Dengan dibantu konsep *maritime security*, penelitian ini mengkaji tiga aspek penting dalam kebijakan pertahanan Indonesia yakni upaya yuridis, peran Kementerian/Lembaga, serta keterlibatan Indonesia dalam forum internasional. Berjalannya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak baik keluarga, teman, dosen pembimbing, maupun narasumber. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih terhadap semua bantuan dalam bentuk apapun. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita membuat hal yang berguna bagi bangsa dan negara serta lingkungan kita. Atas kekurangan maupun kelebihan, penulis berharap dapat tulisan akhir ini berguna bagi pembaca.

Salatiga, 27 Januari 2017

Rambu Asana

ABSTRAK

Dari 17.506 lebih pulau, 92 di antaranya adalah pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan laut langsung dengan 10 negara lain yakni Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Timor Leste, Papua New Guinea, Republik Palau, Australia, dan India. Dari 92 pulau tersebut, menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), ada 12 pulau-pulau kecil terluar yang rawan secara pertahanan dan keamanan karena merupakan titik koordinat terluar. Kekalahan Indonesia dalam memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan juga menjadi salah satu titik terhadap kesadaran negara tentang pentingnya pulau-pulau kecil terluar. Dengan kehadiran Joko Widodo bersama Doktrin Poros Maritim Dunia, menjadikan pulau-pulau kecil terluar sebagai kajian strategis bagi penyusunan kebijakan pertahanan Indonesia. Penelitian ini merupakan upaya untuk menggambarkan kebijakan pertahanan yang diterapkan Indonesia terhadap pulau-pulau kecil terluar sebagai beranda kedaulatan negara. Dengan menggunakan konstruktivisme, penulis melihat adanya kekuatan ide yang dituangkan Joko Widodo melalui Doktrin Poros Maritim Dunia, yang kemudian membentuk wajah baru Indonesia dalam memperlakukan pulau-pulau kecil terluar yang merupakan salah satu komponen penting pada sektor maritim. Konsep *maritime security* juga digunakan penulis dalam menganalisa kebijakan pertahanan karena mengingat militer tetap menjadi satu bagian penting dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI, khususnya di wilayah perbatasan. Dengan menggunakan metode wawancara dan telaah pustaka, penulis menyajikan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, ditemui bahwa Joko Widodo berhasil menuangkan idenya ke dalam kebijakan pertahanan Indonesia, bahkan hingga melahirkan berbagai peraturan nasional yang berpatok pada UNCLOS 1982. Joko Widodo juga berhasil menggerakkan Kementerian/Lembaga terkait yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menjalankan perannya di pulau-pulau kecil terluar. Namun demikian, pemerintahan Joko Widodo masih jauh dari kata aktif dalam keterlibatannya di forum internasional untuk membawa isu pulau-pulau kecil terluar.

Kata Kunci : Kebijakan Pertahanan, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Konstruktivisme, Poros Maritim Dunia

ABSTRACT

From more than 17.506 islands, 92 among them are the outermost small islands which have sea border with ten neighbor states including Malaysia, Singapura, Phillippines, Vietnam, Thailand, Timor-Leste, Papua New Guinea, Republic of Palau, Australia and India. According to The National Agency for Border Management (BNPP), from 92 of the outermost small islands above, 12 are having the vulnerability in security and defense because they were in the outermost coordinate point. After The International Court of Justice decided that sovereignty over Sipadan and Ligitan Island belongs to Malaysia, Indonesia puts the outermost small islands as one of the most important issues. Joko Widodo with his Global Maritime Axis Doctrine puts the outermost small islands as strategic studies in defense policy. This research aims to describe Indonesian defense policy of Joko Widodo's era toward the outermost small islands as state sovereign verandah. By using constructivism, the author saw that Joko Widodo's ideas of Global Maritime Axis Doctrine have shaped Indonesian new forms toward how it treat the outermost small islands which one of the most important components in maritime. The author also using maritime security concept to analyze Indonesia defense policy because military existence still plays an important role in protecting Indonesian sovereignty, especially in the border region. By using research methods of interviews and literature review, this research presented in a qualitative approach. Through this research, the author found that Joko Widodo transfers his idea in Indonesian defense policy successfully, and moreover can make some national constitutions which are based on UNCLOS 1982. The Ministry and/or Institution under Joko Widodo's era, such as Ministry of Defense, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, and The National Agency for Border Management also played their roles into the outermost small islands. Even though, Indonesian defense policy in Joko Widodo's era still far from involvement into the international forum to bring the outermost small islands issues.

Keywords : Defence Policy, The Outermost Small Islands, Constructivism, Global Maritime Axis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR ...	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	10
3. Tujuan Penelitian.....	11
4. Manfaat Penelitian.....	11
5. Batasan Penelitian.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	12
1. Kerangka Teoritis	12
1.1. Konstruktivisme	12
1.2. Konsep <i>Maritime Security</i>	14
2. Penelitian Terdahulu.....	19
2.1. Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007)	19
2.2. Pemberdayaan Pulau Terluar Tidak Berpenghuni di Sekitar Selat Malaka dalam Meningkatkan Ketahanan Negara (Perspektif Strategis Ketahanan Nasional).....	21
3. Kerangka Pikir Penelitian.....	24
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	25
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
2. Unit Amatan dan Unit Analisis	26

2.1. Unit Amatan	26
2.2. Unit Analisis	26
3. Jenis dan Sumber Data	26
3.1. Jenis Data.....	26
3.2. Sumber Data	27
4. Metode Pengumpulan Data	28
5. Analisis Data	28
6. Lokasi dan Jadwal Penelitian	29
BAB IV: EVOLUSI KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA	30
1. Masa Pemerintahan Soekarno (1945-1949,1950-1967).....	31
2. Masa Pemerintahan Soeharto (1967-1998)	34
3. Masa Pemerintahan B.J.Habibie (1998-1999).....	36
4. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001).....	37
5. Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri (2001-2004).....	39
6. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)	40
BAB V: KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP PULAU- PULAU KECIL TERLUAR PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO	47
1. Upaya Yuridis.....	49
1.1. Hukum Internasional	49
1.2. Peraturan dan Undang-Undang Nasional	56
2. Peran Kementerian/Lembaga	61
2.1. Kementerian Pertahanan	61
2.2. Kementerian Kelautan dan Perikanan	67
2.3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan.....	71
3. Keterlibatan dalam Forum Internasional	75
Bab VI: PENUTUP	79
1. Kesimpulan.....	79
2. Rekomendasi Kebijakan	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87

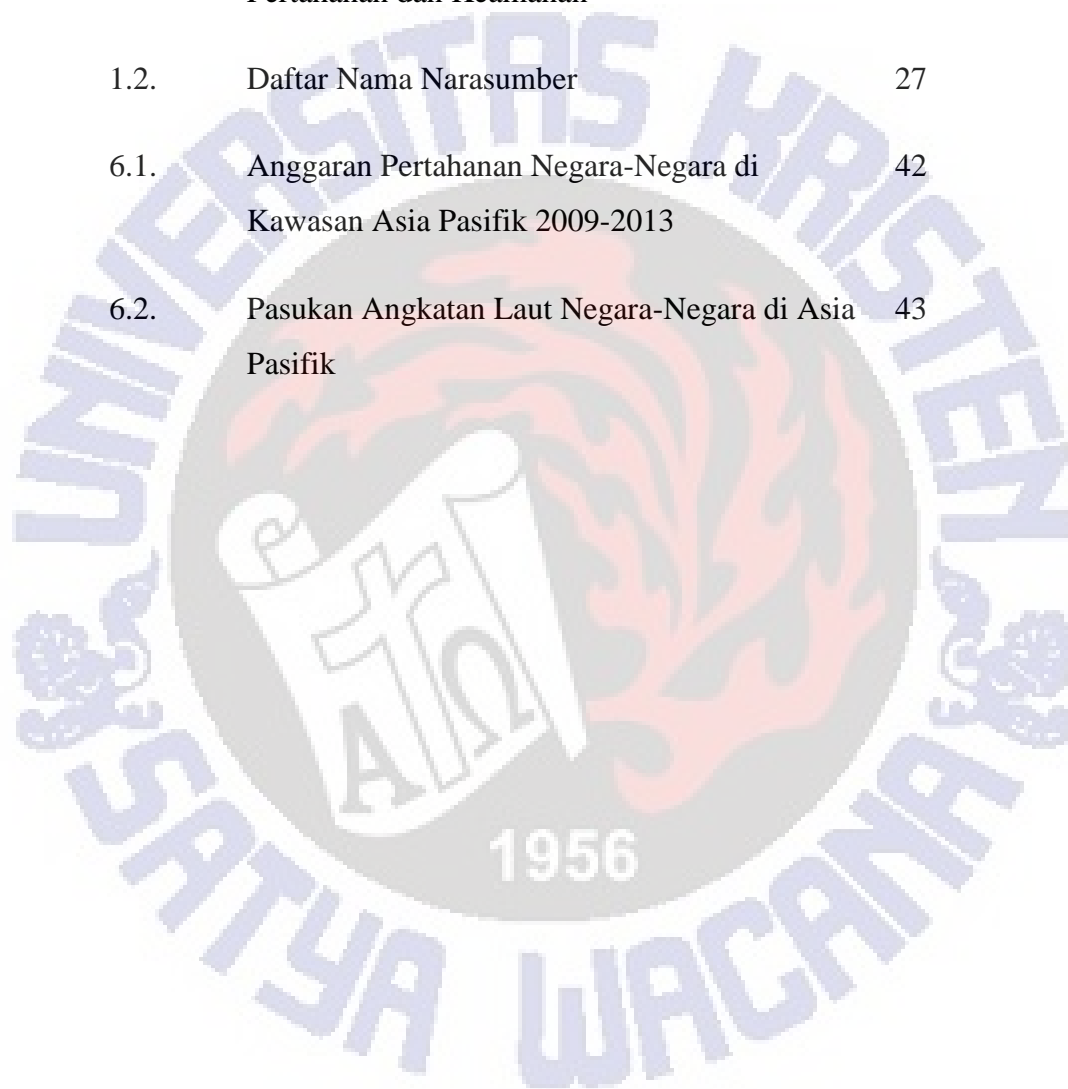
DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar	Judul	Halaman
1	Peta Perbatasan Laut Indonesia dengan 10 Negara Tetangga	4
2	Peta Sebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar di Seluruh Indonesia	5



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1.	12 Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Rawan Pertahanan dan Keamanan	6
1.2.	Daftar Nama Narasumber	27
6.1.	Anggaran Pertahanan Negara-Negara di Kawasan Asia Pasifik 2009-2013	42
6.2.	Pasukan Angkatan Laut Negara-Negara di Asia Pasifik	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Part IV Archipelagic State (Article 46-54)</i>	87
2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019	92
3	Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : Kep/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015	108
4	Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perbatasan Darat, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri	129
5	Hasil Wawancara dengan Peneliti/Penulis Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI)	131
6	Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Peningkatan Infrastruktur, Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	133
7	Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Wilayah Perbatasan Laut, Direktorat Wilayah Pertahanan, Ditjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan	134
8	Hasil Wawancara dengan Analisis Madya Multilateral, Direktorat Kerjasama Internasional, Ditjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan	136